

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers.

Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly, 2020, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia: Perspektif Indonesia*, Penerbit Kompas, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly, 2020, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nusamedia, Bandung.

Darmodiharjo Darji dan Shidarta, 2002, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia, Jakarta.

Ibrahim, Johnny, 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang

Kurniawan, Rudi Cahya, 2022, *Memahami Ilmu Hukum*, Cv. Eureka Media Aksara, Purbalingga.

M. Syamsuddin, 2017, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Indonesia: Teori dan Praktek*, Pustaka Harapan, Yogyakarta.

Mahfud MD, Moh, 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.

Mahfud MD, Moh, 2009, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke -11, Kencana, Jakarta.

Muhammad Yasir S., et al, 2020, *Filsafat Politik John Rawls: Sebuah Kajian Teoritis*, Grasindo, Jakarta.

Muntoha, 2013, *Negara Hukum Indonesia, Pasca Perubahan UUD 1945*, Penerbit Kaubama, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2008, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok.

Theo Huijebbers, 2005, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cetakan ke 5, Kanisius, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945

Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang

Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)

Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan agama

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk Pemeluknya untuk pelaksanaannya di daerah otonom, pengaturannya perlu mendasarkan dan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;